

BUPATI SRAGEN SAMPAIKAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN 2023 PADA DPRD SRAGEN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2024/03/15/WhatsApp-Image-2024-03-15-at-155658-2859714886.jpeg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM – Bupati Sragen Kusdinar Untung Yuni Sukowati hadir dalam sidang paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir Tahun Anggaran 2023 pada Jumat (15/3/2024).

Dalam kesempatan tersebut, bupati berharap masyarakat Sragen dapat memahami penyampaian LKPJ ini. Karena yang merupakan tolok ukur untuk melihat gambaran pelaksanaan tugas bupati dan wakil bupati, sekaligus sebagai pertanggungjawaban dalam pengelolaan pemerintahan daerah selama 2023.

Yuni menjelaskan, tahun anggaran 2023 merupakan tahun kedua tahap Menuju Kabupaten Sragen, Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong. Seperti dalam rumusan visi RPJMD Kabupaten Sragen 2021-2026.

Di dalamnya menyangkut lima misi. Di antaranya meningkatkan kualitas SDM, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi. Kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi dan ketahanan pangan, menangani kemiskinan, memperluas kesempatan kerja. Serta mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong-royong.

Bupati menekankan tingkat kemandirian keuangan daerah dari target 20,45 persen tercapai dengan realisasi meningkat menjadi 21,45 persen. Hal ini terutama didukung oleh kenaikan pendapatan asli daerah (PAD).

”Realisasi PAD tahun 2023 mencapai Rp 406.014.289.747. Dengan demikian naik 11,39 persen dibanding tahun 2022,” ujarnya.

Kemudian terkait pengelolaan belanja daerah, pada APBD Penetapan dan Perubahan Tahun Anggaran 2023 total sebesar Rp 2.682.649.621.649. Realisasinya mencapai Rp 2.504.879.868.655 atau 93,37 persen.

Terkait pengelolaan pembiayaan daerah realisasinya terdapat empat target penerimaan pembiayaan sebesar Rp 508.287.252.889. Terealisasi sebesar Rp 505.725.522.889 atau 99,5 persen, yang terdiri atas SiLPA Tahun Anggaran 2022 dan Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun 2023.

Kemudian target pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 77.850.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 59.915.826.000 atau 76,96 persen. Target pengeluaran terdiri atas penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada 2023.

Selanjutnya berdasarkan realisasi APBD Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2023, SiLPA tahun 2023 sebesar Rp 244.375.471.480.

”Kami menyadari, apa yang telah dilakukan belum dapat sepenuhnya memenuhi harapan dan aspirasi semua pihak. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun akan kami terima untuk kemajuan Bumi Sukowati,” ujar bupati.

Dia menambahkan, kerjasama seluruh SKPD serta dukungan yang besar dari seluruh anggota DPRD Sragen, pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023 dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari sejumlah penghargaan yang telah diterima pada tahun 2023.

”Selanjutnya proses pemberian rekomendasi lebih lanjut, kami serahkan sepenuhnya kepada Dewan yang terhormat,” terang bupati. (din/adi)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/sragen/844445285/bupati-sragen-yuni-sampaikan-pertanggungjawaban-anggaran-2023-pada-dprd-sragen>, “Bupati Sragen Yuni Sampaikan Pertanggungjawaban Anggaran 2023 pada DPRD Sragen”, tanggal 15 Maret 2024.
2. <https://sragenkab.go.id/berita/bupati-yuni-sampaikan-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-2023.html>, “Bupati Yuni Sampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023”, tanggal 15 Maret 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(jjaanambas.blogspot.com\)](https://www.jjaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*